

RINGKASAN

Salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan TKI yakni diterbitkannya Undang-Undang Nomor.39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Upaya perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia ini dilakukan dengan model *collaborative governance* dari Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta serta Lembaga Swadaya Masyarakat dalam urusan perlindungan TKI. Penelitian ini fokus pada kajian *collaborative governance* dalam upaya penanganan permasalahan pemulangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Banyumas. Selain itu, peneliti mengetahui faktor penghambat pelaksanaan *collaborative governance* yang dilakukan *stakeholder* dalam masalah pemulangan Banyumas.

Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sasaran penelitian ini yakni perwakilan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan LSM Seruni Metode pengumpulan data yang digunakan adalah melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis interaktif yang diungkapkan Miles dan Huberman dan validitas data menggunakan triangulasi data sumber.

Hasil penelitian menunjukkan beberapa poin kesimpulan. Secara birokrasi, proses penyelesaian pemulangan TKI diawali dari inisiasi TKI, yang kemudian direspon oleh agen PPTKIS untuk dilaporkan kepada KBRI. Berikutnya, KBRI melakukan tindak lanjut kepada pihak BNP2TKI, BP3TKI di provinsi, dan Dinas Tenaga Kerja di kabupaten. Pada titik ini terbentuk tim pelaksana koordinasi meliputi perwakilan Dinas Tenaga kerja, PPTKIS, LSM, dan TKI guna perencanaan, persiapan dokumen verifikasi pihak BP3TKI dan pelaksanaan pemulangan hingga penjemputan yang dibantu oleh KBRI dan agen PPTKIS hingga TKI tersebut sampai di daerah asal. LSM Seruni dalam proses ini pun akan melakukan pendampingan purna TKI untuk pemberdayaan. Pada tingkat formalitas pelaksanaan pemulangan TKI asal Banyumas berjalan dengan tuntas dan lancar hingga TKI tersebut tiba di Bandara Soekarno-Hatta sampai dengan daerah asal. Dari tingkat durasi dilakukan secara intensif baik secara formal dan informal, dan tingkat fokus ditunjukkan dari adanya sikap yang sama dalam setiap proses koordinasi dan sosialisasi diantara *stakeholder* yang terlibat.

Implikasi yang didapatkan dari hasil penelitian ini adalah supaya *stakeholder* untuk merubah tahapan penyelesaian menjadi lebih singkat namun efektif melalui perundang-undangan, peningkatan kinerjanya tidak hanya kasus pemulangan saja, tapi juga pada kasus lain seperti masalah TKI ilegal yang terdeportasi, kekerasan TKI, atau masalah lain yang sifatnya lebih kompleks, dan meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja secara konsisten dan konkrit melakukan perbaikan baik sifatnya fisik (SDM dan fasilitas) maupun non-fisik (efektivitas koordinasi) demi kelancaran proses kolaborasi pada kasus-kasus lain yang mungkin terjadi.

Kata Kunci : Pemulangan TKI, *Collaborative Governance*

ABSTRACT

One form of government responsibility in managing TKI is the issuance of Law Number 39 Year 2004 Concerning the Placement and Protection of Indonesian Workers Abroad. This effort to protect Indonesian Workers is carried out with a collaborative governance model from the Department of Manpower, Cooperatives and Small and Medium Enterprises, Implementing Placement of Private Indonesian Workers and Non-Government Organizations in the matter protecting Indonesian Migrant Workers. This research focuses on the study of collaborative governance in an effort to resolve the request for return of migrant workers from Banyumas with two research objectives, namely knowing the application of collaborative governance carried out by stakeholders in efforts to resolve the problems of migrant workers from Banyumas. In addition, researchers also want to know the factors that hinder the implementation of collaborative governance by stakeholders in the Banyumas repatriation problem

The research method used is qualitative with a descriptive approach. The targets of this study are representatives of the Department of Labor, Cooperatives and Small and Medium Enterprises, PPTKIS, Seruni NGOs, and the families of migrant workers. Data collection methods used are through interviews, observation, and documentation. Data analysis using interactive analysis revealed by Miles and Huberman and data validity using triangulation of source data.

The results showed several conclusion points. First, in the bureaucracy there are 11 stages of the process of completing the return of migrant workers starting from the initiation of migrant workers to pick-up until the origin. Second, the Department of Manpower, PPTKIS, NGOs, and the families of TKI as stakeholders have made maximum efforts in every aspect of the collaboration process, be it face to face dialogue, trust building, commitment to processes, share understanding, and intermediate outcomes. Third, each stakeholder has its own obstacles in solving the problem of requesting the return of migrant workers, such as from the government which is a long bureaucratic process, from the PPTKIS namely limitations in human resources, from the NGO Seruni does not have a strong legal standing, and from the TKI itself that is difficult to make complaints intensively because it is still bound by a work contract with the employer

The implications obtained the results of this study are for stakeholders to change the completion stage to be shorter but effective through legislation, improving performance not only in cases of repatriation, but also in other cases such as the problem of deported illegal migrant workers, violence of migrant workers, or other problems which are more complex in nature, and improve the quality of service and performance consistently and concretely make improvements both physical (HR and facilities) and non-physical (effectiveness of coordination) for the smooth process of collaboration in other cases that may occur.

Keywords: Return of Indonesian Migrant Workers, Collaborative Governance